

## MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Waktu: 2 jam

### A. PENGANTAR

Pasal 51 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 menyatakan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan konsep pengelolaan sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi pendidikan.

Pada pembahasan tentang MBS ini, fasilitator mendorong peserta untuk menggali dan menemukan pengertian dan ciri-ciri MBS melalui diskusi, pameran, observasi materi audio visual, dan memformulasikan simpulan tentang MBS dari serangkaian kegiatan di atas. Setelah memahami keunggulan MBS diharapkan sekolah menerapkan MBS.



Dalam pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah peserta pelatihan mempelajari keuangan sekolah melalui kunjungan ke sekolah

### B. TUJUAN

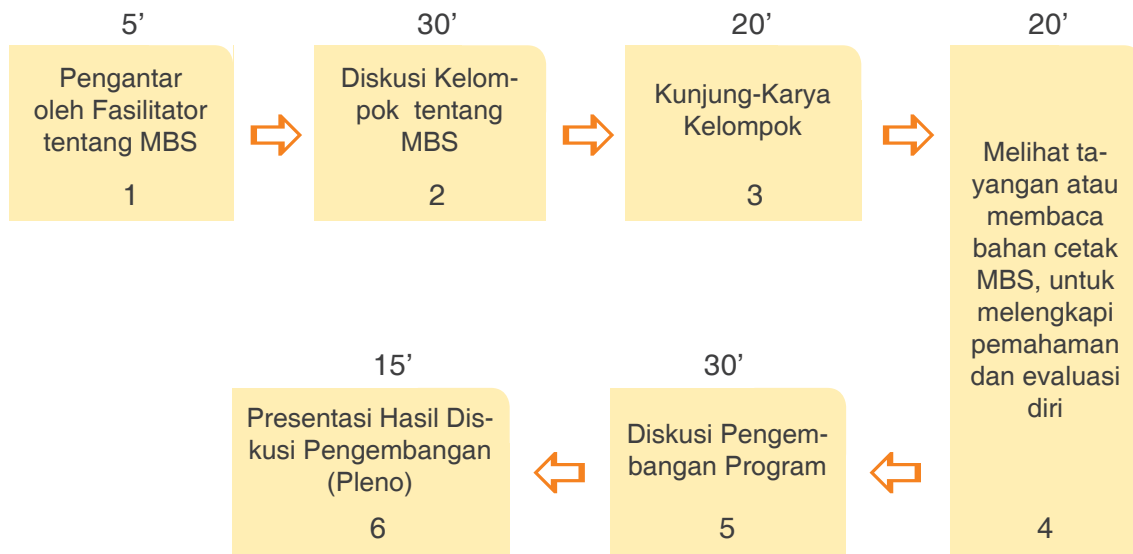
Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:

1. mengidentifikasi ciri-ciri sekolah yang berhasil menerapkan MBS
2. mengidentifikasi ciri-ciri manajemen berbasis sekolah
3. menyusun program peningkatan mutu sekolah
4. meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan

### C. BAHAN DAN ALAT

1. Tayangan yang berisi gambar-gambar tentang kemajuan MBS
2. Bahan cetak tentang praktik yang baik dalam MBS
3. Lembar Kerja Format 2.1 dan 2.2
4. ATK: kertas plano dan spidol berbagai warna

## D. LANGKAH KEGIATAN



## 1. Pengantar (5 menit)

**Fasilitator** menyampaikan pengantar tentang aktivitas yang akan dilakukan dan memberikan sedikit penjelasan tentang MBS. Fasilitator juga menjelaskan dasar hukum penerapan MBS, yaitu Pasal 51 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003.

## 2. Diskusi Kelompok tentang MBS (total 30 menit)

**Fasilitator** membagi peserta ke dalam kelompok yang terdiri atas 8-10 orang yang bervariasi profesinya. Kelompok dalam ToT dapat berupa kelompok kabupaten/kota (setiap kabupaten/kota dapat dipecah menjadi 2-3 kelompok kecil). Dalam pelatihan di daerah, kelompok ini adalah kelompok sekolah yang terdiri dari:

- Kepala Sekolah dan Pengawas
- Guru
- Komite Sekolah dan Tokoh Masyarakat

**Tugas 1 (10 menit):** mendiskusikan dan membuat daftar komponen-komponen yang mempengaruhi kualitas sekolah dan menuliskannya dalam Format 2.1 di kertas plano.

**Tugas 2 (20 menit):** mendiskusikan kondisi yang diharapkan oleh sekolah dari setiap komponen dalam Tugas 1. Hasil diskusi ditulis di format yang sama (2.1) dan dipajangkan.

### Format 2.1: Kondisi Sekolah yang Diharapkan

| Komponen                   |   | Kondisi yang diharapkan |
|----------------------------|---|-------------------------|
| 1. Proses Belajar-Mengajar | a. Proses belajar mengajar  |                         |
|                            | b. Angka Putus Sekolah (APS)  |                         |
|                            | c. Persentase kelulusan   |                         |
|                            | d. Kemampuan membaca, menulis dan berhitung untuk kelas I, II, III (kelas awal) |                         |
|                            | e. Kemampuan Bahasa, Matematika, IPA, dan IPS                                   |                         |
| .....                      |   |                         |

Pajangan diatur agar mudah dilihat, menarik untuk dikunjungi, dan dapat dibawa pulang sebagai oleh-oleh bagi peserta. Di setiap karya sebaiknya diberi ruang kosong sebagai tempat catatan/komentar pengunjung.

### 3. Kunjung-Karya antar Kelompok (20 menit)

**Fasilitator** mengatur proses kunjung-karya supaya berjalan lancar, misalnya peserta secara bergilir mengunjungi karya setiap kelompok selama 5-10 menit dan memberikan komentar dengan memberikan catatan tertulis di lembar yang telah disiapkan.

**Peserta** (setiap kelompok) melakukan kunjungan ke kelompok lain untuk saling belajar dan memberi informasi. Setiap kelompok menunjuk anggota kelompoknya untuk menjaga pajangan dan memberikan informasi, sedangkan anggota yang lain mencari informasi ke kelompok lain. Jika ada banyak kelompok, anggota kelompok dapat dibagi sehingga semua kelompok dapat dikunjungi.

### 4. Melengkapi Pemahaman tentang MBS (20 menit)

**Fasilitator** menugaskan kepada peserta pelatihan untuk melengkapi pemahamannya tentang MBS dengan menyaksikan tayangan atau membaca bahan cetakan yang berkaitan erat dengan MBS.

**Peserta** melihat tayangan atau membaca bahan cetakan digunakan untuk melengkapi pemahaman tentang MBS seperti yang telah diperoleh dari kunjung-karya.

**Peserta** merefleksi hasil pengamatan dari kunjung karya tentang MBS dan melakukan evaluasi diri dengan mempelajari ciri-ciri manakah yang sudah

dilaksanakan di sekolah dan ciri-ciri manakah yang belum dilaksanakan di sekolah.

### 5. Diskusi Pengembangan Program Sekolah (30 menit)

**Fasilitator** menjelaskan bahwa salah satu kunci dalam MBS adalah membuat perencanaan program peningkatan mutu sekolah, melaksanakan program tersebut, dan mengevaluasinya.

**Fasilitator** memberi contoh bagaimana menyusun program dan kegiatan.

**Fasilitator** menugaskan peserta mengidentifikasi program apa saja yang akan dilaksanakan di sekolahnya (Program dapat diambil dari Format 2.1), serta kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan.

**Peserta** berdiskusi dalam kelompok sekolah untuk menemukan gagasan-gagasan yang berupa program-program peningkatan mutu sekolah. Hasil diskusi dapat dituliskan dalam Format 2.2 sebagai berikut:

#### Format 2.2: Mengembangkan Program Peningkatan Mutu Sekolah

| Program | Kegiatan |
|---------|----------|
|         |          |
|         |          |
|         |          |

Diskusi pengembangan program dilakukan oleh masing-masing kelompok sebagai persiapan bahan diskusi pleno.

### 6. Diskusi Pleno (15 menit)

Diskusi pleno berbentuk presentasi hasil diskusi pengembangan program. Presentasi dalam diskusi pleno dipunculkan (dipusatkan) pada laporan hasil diskusi pengembangan yang bervariasi.

**Fasilitator** memilih beberapa kelompok untuk presentasi (*sebaiknya satu kelompok melaporkan, kelompok yang lain menambahkan*).

## E. BAHAN BACAAN UNTUK FASILITATOR DAN PESERTA

### MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

#### 1. Pengantar

Usaha peningkatan mutu pendidikan di tingkat pendidikan dasar telah banyak dilakukan tetapi hasilnya belum begitu menggembirakan. Berbagai studi dan pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa paling sedikit ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata.

- a. Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran atau hasil pendidikan terlalu memusatkan pada masukan dan kurang memperhatikan proses pendidikan.
- b. Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan kepada keputusan birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang menyentuh atau kurang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah setempat. Di samping itu segala sesuatu yang terlalu diatur menyebabkan penyelenggara sekolah kehilangan kemandirian, inisiatif, dan kreativitas. Hal tersebut menyebabkan usaha dan daya untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu layanan dan keluaran pendidikan menjadi kurang termotivasi.
- c. Ketiga, peran serta masyarakat terutama orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan dana. Padahal peranserta mereka sangat penting di dalam proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas.

Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dilakukan orientasi kembali tentang penyelenggaraan pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

#### 2. Faktor Pendorong Perlunya Desentralisasi Pendidikan

Saat ini sedang berlangsung perubahan paradigma manajemen pemerintahan<sup>1</sup>. Beberapa perubahan tersebut antara lain:

- a. Dari orientasi manajemen yang diatur oleh negara ke orientasi pasar. Aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan pertama dalam mengolah dan menetapkan kebijaksanaan untuk mengatasi persoalan yang timbul.
- b. Dari orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian ke demokrasi. Pendekatan kekuasaan bergeser ke sistem yang mengutamakan peranan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi pertimbangan utama dalam tatanan yang demokratis.

---

<sup>1</sup>Miftah Thoha. "Desentralisasi Pendidikan", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 017, Tahun Ke-5, Juni 1999.

- c. Dari sentralisasi kekuasaan ke desentralisasi kewenangan. Kekuasaan tidak lagi terpusat di satu tangan melainkan dibagi ke beberapa pusat kekuasaan secara seimbang.
- d. Sistem pemerintahan yang jelas batas dan aturannya seakan-akan menjadi negara yang sudah tidak jelas lagi batasnya akibat pengaruh dari tata-aturan global. Keadaan ini membawa akibat tata-aturan yang hanya menekankan tata-aturan nasional saja dan kurang menguntungkan dalam percaturan global.

Fenomena ini berpengaruh terhadap dunia pendidikan sehingga desentralisasi pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tentu saja desentralisasi pendidikan bukan berkonotasi negatif, yaitu untuk mengurangi wewenang atau intervensi pejabat atau unit pusat melainkan lebih berwawasan keunggulan. Kebijakan umum yang ditetapkan oleh pusat sering tidak efektif karena kurang mempertimbangkan keragaman dan kekhasan daerah. Di samping itu membawa dampak ketergantungan sistem pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (lokal), menghambat kreativitas, dan menciptakan budaya menunggu petunjuk dari atas. Dengan demikian desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memberdayakan peranan unit bawah atau masyarakat dalam menangani persoalan pendidikan di lapangan. Banyak persoalan pendidikan yang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit tataran di bawah atau masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di kebanyakan negara. Faktor-faktor pendorong penerapan desentralisasi<sup>2</sup> terinci sbb:

- Tuntutan orangtua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan.
- Anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah.
- Ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam.
- Penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat.
- Tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan.

Desentralisasi pendidikan mencakup tiga hal, yaitu:

- a) Manajemen berbasis lokasi
- b) Pendelegasian wewenang
- c) Inovasi kurikulum

Pada dasarnya manajemen berbasis lokasi dilaksanakan dengan meletakkan semua urusan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengurangan

---

<sup>2</sup>NCREL, 1995, *Decentralization: Why, How, and Toward What Ends?* NCREL's Policy Briefs, report 1, 1993 dalam Nuril Huda "Desentralisasi Pendidikan: Pelaksanaan dan Permasalahannya", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 017, Tahun Ke-5, Juni 1999.

administrasi pusat adalah konsekuensi dari yang pertama dengan diikuti pendelegasian wewenang dan urusan pada sekolah. Inovasi kurikulum menekankan pada pembaharuan kurikulum sebesar-besarnya untuk meningkatkan kualitas dan persamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum disesuaikan benar dengan kebutuhan peserta didik di daerah atau sekolah. Hal ini sesuai dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 38 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah". Peraturan Keputusan Menteri Nomor 22/2006, dan 23/2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan menjadi dasar pengembangan kurikulum sekolah yang disebut KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).

Dalam pengembangan kurikulum, daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan silabus yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan daerah. Pada umumnya program pendidikan yang tercermin dalam silabus sangat erat kaitannya dengan program-program pembangunan daerah. Sebagai contoh, suatu daerah yang menetapkan untuk mengembangkan ekonomi daerahnya melalui bidang pertanian, implikasinya silabus IPA akan diperkaya dengan materi-materi biologi pertanian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanian. Manajemen berbasis lokasi yang merujuk ke sekolah, akan meningkatkan otonomi sekolah dan memberikan kesempatan kepada tenaga sekolah, orangtua, siswa, dan anggota masyarakat dalam pembuatan keputusan.

Berdasarkan hasil-hasil kajian yang dilakukan di Amerika Serikat, *Site Based Management* merupakan strategi penting untuk meningkatkan kualitas pembuatan keputusan-keputusan pendidikan dalam anggaran, personalia, kurikulum, dan penilaian. Studi yang dilakukan di El Salvador, Meksiko, Nepal, dan Pakistan menunjukkan pemberian otonomi pada sekolah telah meningkatkan motivasi dan kehadiran guru. Tetapi desentralisasi pengelolaan guru tidak secara otomatis meningkatkan efisiensi operasional. Jika pengelola di tingkat daerah tidak memberikannya, pengelolaan semakin tidak efektif. Oleh karena itu, beberapa negara telah kembali ke sistem sentralisasi dalam hal pengelolaan ketenagaan, misalnya Kolombia, Meksiko, Nigeria, dan Zimbabwe<sup>3</sup>.

Misi desentralisasi pendidikan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, terciptanya infrastruktur kelembagaan yang menunjang terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan jaman, antara lain terserapnya konsep globalisasi, humanisasi, dan demokrasi dalam pendidikan. Penerapan demokratisasi dilakukan dengan mengikutsertakan unsur-unsur

---

<sup>3</sup>Gaynor, Cathy (1998) *Decentralization of Education: Teacher management*. Washington, DC, World Bank dalam Nuril Huda "Desentralisasi Pendidikan: Pelaksanaan dan Permasalahannya", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 017, Tahun Ke-5, Juni 1999.

pemerintah setempat, masyarakat, dan orangtua dalam hubungan kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Hal ini tercermin dengan adanya kurikulum lokal. Kurikulum juga harus mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka mengembangkan kebudayaan nasional.

Proses belajar mengajar menekankan terjadinya proses pembelajaran yang menumbuhkan kesadaran lingkungan yaitu memanfaatkan lingkungan baik fisik maupun sosial sebagai media dan sumber belajar, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan alat pemersatu bangsa<sup>4</sup>.

### 3. Konsep Dasar MBS

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

### 4. Karakteristik MBS

Apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka MBS akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada. Ciri-ciri MBS bisa dilihat dari sudut sejauh mana sekolah tersebut dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), proses belajar-mengajar dan sumber daya sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

#### Ciri-ciri sekolah yang melaksanakan MBS

| Organisasi Sekolah   | Proses Belajar mengajar   | Sumber Daya Manusia   | Sumber Daya dan Administrasi   |
|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan manajemen/ organisasi/ kepemimpinan transformasional * dalam mencapai tujuan sekolah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas belajar siswa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memberdayakan staf dan menempatkan personel yang dapat melayani keperluan siswa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tsb. sesuai dengan kebutuhan</li> </ul> |

<sup>4</sup>Donoseputro, M (1997) *Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pendidikan: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Alat Pemersatu Bangsa*, Suara Guru 4: 3-6.

| Organisasi Sekolah  | Proses Belajar mengajar  | Sumber Daya Manusia   | Sumber Daya dan Administrasi  |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya sendiri</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki staf dengan wawasan MBS</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola dana sekolah secara efektif dan efisien</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola kegiatan operasional sekolah</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan dukungan administratif</li> </ul>                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan program pengembangan yang diperlukan siswa</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjamin kesejahteraan staf dan siswa</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola dan memelihara gedung dan sarana</li> </ul>        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Menggerakkan partisipasi masyarakat</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Berperanserta dalam memotivasi siswa</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan forum /diskusi untuk membahas kemajuan kinerja sekolah</li> </ul> |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah</li> </ul> |  |   |   |

Dikutip dari Focus on School: The Future Organization of Education Service for Student, Department of Education, Queensland, Australia\*)


\*Pada dasarnya kepemimpinan transformasional mempunyai tiga komponen yang harus dimilikinya, yaitu:

- Memiliki karisma yang didalamnya termuat perasaan cinta antara Kepala Sekolah (KS) dan staf secara timbal-balik sehingga memberikan rasa aman, percaya diri, dan saling percaya dalam bekerja.
- Memiliki kepekaan individual yang memberikan perhatian setiap staf berdasarkan minat dan kemampuan staf untuk pengembangan profesionalnya.
- Memiliki kemampuan dalam memberikan simulasi intelektual kepada staf. KS mampu mempengaruhi staf untuk berfikir dan mengembangkan atau mencari berbagai alternatif baru<sup>5</sup>.

Secara ringkas perubahan pola manajemen pendidikan lama (konvensional) ke pola baru (MBS) dapat digambarkan sebagai berikut:

<sup>5</sup>Burns, J.M (1978) Leadership Harper & Row, New York dalam Rumtini (1977) *Transformational and Transactional Leadership Performance of Principals of Junior Secondary School in Indonesia*, unpublished thesis.

### Pergeseran Pola Manajemen

| Pola Lama                                     | Berubah ke  | Pola MBS  |
|---|---|---|
| Sentralistik                                  |  | Desentralisasi  |
| Subordinasi                                   |   | Otonomi   |
| Pengambilan keputusan terpusat                |   | Pengambilan keputusan partisipatif                      |
| Pendekatan birokratik                         |   | Pendekatan profesional                                  |
| Pengorganisasian yang hirarkis                |   | Pengorganisasian yang setara                            |
| Mengarahkan                                   |   | Memfasilitasi   |
| Dikontrol dan diatur                          |   | Motivasi diri dan saling mempengaruhi                   |
| Informasi ada pada yang berwenang             |   | Informasi terbagi                                       |
| Menghindari risiko                            |   | Mengelola risiko  |
| Menggunakan dana sesuai anggaran sampai habis |   | Menggunakan dana sesuai kebutuhan dan seefisien mungkin |

MBS yang akan dikembangkan merupakan bentuk alternatif pengelolaan sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi namun masih dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. MBS harus mengakibatkan peningkatan proses belajar mengajar sehingga hasil belajarpun meningkat. Sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip MBS adalah sekolah yang harus lebih bertanggungjawab, kreatif dalam bertindak dan mempunyai wewenang lebih serta dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh pemangku kepentingan.

Diharapkan dengan menerapkan manajemen pola MBS, sekolah lebih berdaya dalam beberapa hal berikut:

- Menyadari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah tersebut.
- Mengetahui sumberdaya yang dimiliki dan masukan pendidikan yang akan dikembangkan.
- Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk kemajuan lembaga-nya.
- Bertanggungjawab terhadap orangtua, masyarakat, lembaga terkait, dan pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah.
- Persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha-usaha kreatif-inovatif untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan.
- Meningkatkan peran serta Komite Sekolah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) untuk mendukung kinerja sekolah.

- Menyusun dan melaksanakan program sekolah yang mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar (pelaksanaan kurikulum), bukan kepentingan administratif saja.
- Menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah (anggaran, personil, dan fasilitas).
- Mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah walau berbeda dari pola umum atau kebiasaan.
- Menjamin terpeliharanya fasilitas dan sumber daya yang ada di sekolah dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
- Meningkatkan profesionalisme personil sekolah.
- Meningkatnya kemandirian sekolah di segala bidang.
- Adanya keterlibatan semua unsur terkait dalam perencanaan program sekolah (misal: KS, guru, Komite Sekolah, tokoh masyarakat, dll).
- Adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pendidikan sekolah.

### Contoh Sebagian Jawaban Format 2.1: Kondisi Sekolah yang Diharapkan

| Komponen                   |  | Kondisi yang diharapkan |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. Proses Belajar-Mengajar | a. Proses belajar mengajar   |                         |
|                            | b. Angka Putus Sekolah (APS)                                       |                         |
|                            | c. Persentase kelulusan  |                         |
|                            | d. Kemampuan membaca, menulis dan berhitung untuk kelas I, II, III |                         |
|                            | e. Kemampuan Bahasa, Matematika, IPA, dan IPS                      |                         |
| 2. Sarana-Prasarana        | a. Ruang kelas   |                         |
|                            | b. Ruang kepala sekolah/guru                                       |                         |
|                            | c. Kamar mandi/WC siswa  |                         |
|                            | d. Kamar mandi/WC guru   |                         |
|                            | e. Aliran air bersih   |                         |
| 3. Ketenagaan              | a. Jumlah guru   |                         |
|                            | b. Kualifikasi guru  |                         |
|                            | c. Kualifikasi Kepala Sekolah                                      |                         |
|                            | d. Kualitas mengajar guru  |                         |

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 4. Perpustakaan                 | a. Sudut baca kelas                            |  |
|                                 | b. Ruang perpustakaan                          |  |
|                                 | c. Jumlah judul koleksi buku                   |  |
|                                 | d. Kegiatan inovatif di perpustakaan           |  |
| 5. Kesiswaan                    | a. Jumlah siswa per kelas                      |  |
|                                 | b. Jumlah siswa yang telah memiliki buku paket |  |
|                                 | c. Persentase siswa yang melanjutkan sekolah   |  |
| 6. Peran serta masyarakat       |  |  |
| 7. Rencana Pengembangan Sekolah |  |  |
| 8. Keuangan sekolah             |  |  |
| 9. Peran Kepala Sekolah         |  |  |
| 10. Kurikulum                   |  |  |
| 11. ....                        |  |  |



Peran serta masyarakat meningkat dalam manajemen berbasis sekolah

## MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DALAM GAMBAR

### MENGAPA MBS?

Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya MBS sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari atas. Mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri.

### APA ITU MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)?

- Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) alokasi dana kepada sekolah menjadi lebih besar dan sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan sekolah sendiri.
- Sekolah lebih bertanggung jawab terhadap perawatan, kebersihan, dan penggunaan fasilitas sekolah, termasuk pengadaan buku dan bahan belajar. Hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di kelas.
- Sekolah membuat perencanaan sendiri dan mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan masyarakat sekitarnya dalam proses tersebut.
- Kepala sekolah dan guru dapat bekerja lebih profesional dalam memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di sekolahnya.
- MBS merupakan salah satu komponen sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran seperti yang terlihat dalam diagram di bawah ini. Komponen yang lain adalah Peran Serta Masyarakat dan peningkatan mutu kegiatan belajar dan mengajar melalui PAKEM di SD/MI dan Pembelajaran Kontekstual di SLTP/MTs.

